

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Arinanto, Satya, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Balkin, Jack M., 2011, *Living Originalism*, Harvard University Press, Cambridge.

Bickel, Alexander M., 1986, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, Second Edition, Yale University Press, New Haven.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dahl, Robert A., 1971, *Polyarchy: Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven.



Ellis, Andrew, Et.Al., 2006, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm.

Eskridge Jr., William N., 1994, *Dynamic Statutory Interpretation*, Harvard University Press, Cambridge.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Jhering, Rudolf von, 1913, *Law as a Means to an End*, diterjemahkan oleh Isaac Husik, The Boston Book Company, Boston.

Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, New York.

_____, 1967, *Pure Theory of Law*, Harvard University Press, Cambridge.

_____, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

Kötz, Hein dan Konrad Zweigert, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Tony Weir, Clarendon Press, Oxford.

Mahfud MD, Moh., 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Munawar, M. Ramdan, dkk., 2024, *Menjaga Demokrasi: Meninjau Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Lanskap Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Pot, C.W. van der, D.J. Elzinga, dan R. de Lange, 2014, *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*, Edisi ke-16, Kluwer, Deventer

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Scholten, Paul, 1974, *Algemeen Deel*, dalam Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.

Susanti, Bivitri, Et.Al., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi*, PSHK Indonesia, Jakarta.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 52/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 59/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013



Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

C. Skripsi

Nur Safi'i, 2022, "Analisis Yuridis Dualisme Kepemimpinan Persaudaraan Setia Terate," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Jakarta.

D. Jurnal

Ajie, Radita, 2016, "*Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, (Kementerian Hukum dan HAM RI, Ditjen PP).

Alatas, Ali, Ficky M. Zulfickar, dkk., 2022, "*Teori Kemaslahatan sebagai Batasan Judicial Activism Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, (Mahkamah Konstitusi RI).

Ansori, Lutfil, 2017, "*Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*," Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, (FH UPN Veteran Jakarta)

Bisyariyadi, 2015, "*Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*," Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, (Mahkamah Konstitusi RI), dikutip kembali oleh Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur

- Rohman, 2019, "*Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*," Jurnal Hukum, Volume 35, Nomor 2, Desember 2019, (FH Universitas Islam Indonesia)
- Fadli, Moh., Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, 2016, "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis*," Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 2, (FH Universitas Lampung).
- Faiz, Pan Mohamad, 2015, "*Dimensi Teoritis Putusan Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, (Mahkamah Konstitusi RI).
- _____, 2016, "*Dimensi Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, (Komisi Yudisial RI).
- _____, 2016, "*The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia*," Indonesia Law Review, Volume 6, Nomor 2, (FH Universitas Indonesia).
- Fatkurohman dan Miftakhul Huda, 2018, "*Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*," Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, (Mahkamah Konstitusi RI).
- Fuller, Lon L., 1958, "*Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart*," Harvard Law Review, Volume 71, Nomor 4.
- Ghoffar, Abdul, 2018, "*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*," Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, (Mahkamah Konstitusi RI).

_____, 2019, "*Inkonsistensi Pengaturan Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial Indonesia*," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49, Nomor 1, (FH Universitas Indonesia).

Harun, Refly, 2014, "*Menyoal Presidential Threshold dalam Perspektif Hukum Tata Negara*," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, (Kementerian Hukum dan HAM RI).

_____, 2018, "*Presidential Threshold dan Oligarki Partai Politik*," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 2, (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Isra, Saldi, 2010, "*Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 17, Nomor 2, (FH Universitas Islam Indonesia).

_____, 2019, "*Asymmetry in Decentralized, Unitary State: Lessons from the Special Regions of Indonesia*," Journal on Ethnopolitics and Minority Issue in Europe, Volume 18, Nomor 2, 2019, (Academic Consotium Europe).

Jackson, Bernard S., 2007, "*Legalism and Spirituality: Historical, Philosophical and Semiotic Notes on Legislators, Adjudicators, and Subjects*," Liverpool Law Review, Volume 28, (University of Liverpool / Springer).

Johansyah, 2021, "*Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat*," Jurnal Hukum Universitas Palembang, Volume 19, Nomor 2, 2021, (FH Universitas Palembang).

Kozel, Randy J., 2018, "*Precedent and Constitutional Structure*," Northwestern University Law Review, Volume 112, Nomor 4, (Northwestern University).

Kurnia, Titon Slamet, 2019, "*Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional Indonesia*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 26, Nomor 3, (FH Universitas Islam Indonesia).

Latipulhayat, Atip, 2017, "*Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 1, (FH Universitas Islam Indonesia).

Malik, 2009, "*Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*," Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, (Mahkamah Konstitusi RI).

Mas'udah, Al, 2020, "*The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections Elections in Indonesia*," Prophetic Law Review, Volume 2, Issue 1, Juni 2020, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Maxeiner, James R., 2007, "*Legal Certainty and Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy?*" Tulane Journal of International and Comparative Law, Volume 15, (Tulane University Law School, United States of America).

Nufus, Ahmad Fahriza Ilun, Ratna Herawati, dan Amalia Diamantina, 2024, "*Penerapan Presidential Threshold Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*," Diponegoro Law Journal, Volume 13, Nomor 3, (FH Universitas Diponegoro).

- Qadri, Qais Al, 2023, “*Politik Hukum Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*,” Jurnal Hukum Egaliter, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2023, (FH Universitas Kuningan).
- Radbruch, Gustav, 2006, “*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*,” Oxford Journal of Legal Studies, Volume 26, Nomor 1, (Oxford University).
- Rauta, Umbu dan Ninon Melatyugra, 2020, “*Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*,” Jurnal Yudisial, Volume 13, Nomor 1, (Komisi Yudisial RI).
- Rishan, Idul, 2021, “*Praktik Overruling Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Konstitusional*,” Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, (Mahkamah Konstitusi RI).
- Ristawati, Rosa, 2024, “*Penghapusan Presidential Threshold: Langkah Maju untuk Keadilan Konstitusional*,” Artikel Hukum Universitas Airlangga, (Universitas Airlangga).
- Safaat, Muchamad Ali, Djauhari, Slamet Suhartono, dan Sapto Hermawan, 2017, “*Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 2, (FH Universitas Islam Indonesia).
- Satriawan, Iwan, 2019, “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*,” Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, (Mahkamah Konstitusi RI).

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, 2019, "*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*," Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, (Mahkamah Konstitusi RI).

Scharpf, Fritz Wilhelm, 1997, "*Legitimacy in the Multi-Actor European Polity*," European Integration Online Papers, Volume 1, Nomor 16, (European Academic Network).

Soeroso, Fajar Laksono, 2014, "*Aspek Keadilan dalam Sifat Final Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, (Mahkamah Konstitusi RI).

Soelistyo, Liem Tony Dwi, 2020, "*Perkembangan Baru Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*," Jurnal Rechtsvinding, Volume 9, Nomor 1, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI).

Sukma, Gardha Galang Mantara, 2020, "*Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*," Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 1, Januari 2020, (FH Universitas Islam Indonesia).

Sulistiono, Sandy dan Widyawati Boediningsih, 2019, "*Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak: Antara Kepastian Hukum dan Kedaulatan Rakyat*," Jurnal Hukum Novelty, Volume 10, Nomor 1, (FH Universitas Ahmad Dahlan).

Wibowo, Mardian, 2015, *“Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,”* Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, (Mahkamah Konstitusi RI).

Wijaya, Asep, Rosmini, dan Poppilea Erwinta, 2020, *“Problematisasi Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia,”* Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, (FH Universitas Mulawarman).

E. Internet

Arizona, Yance, 2024, *“MK Jadi Benteng Terakhir Demokrasi Konstitusional,”* Artikel Kompas, <https://www.kompas.id>, dikunjungi pada tanggal 13 Januari 2025, Jam 02.13 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *“Alasan MK ‘Berbalik Arah’ dalam Memutus Presidential Threshold,”* <https://www.mkri.id>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2025, Jam 21.45 WIB.

Rauta, Umbu, 2024, *“Menakar Implikasi Konstitusional Putusan MK terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah,”* Kompas.id, 21 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/21/menakar-implikasi-konstitusional-putusan-mk>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2026, Jam 21.30 WIB.

